

Collaborative Governance dalam Pengembangan Program Desa Wisata di Kota Batu

Zendita Alvion¹, Aditya Putra Pramana², Muhammad Kamil^{3*}

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

¹²³ Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur

email: Zenditaalvion123A@gamil.com¹, adityaputrapramana15@gmail.com², kamil@umm.ac.id^{3*}

Abstract

In an effort to improve the economy of the people in Batu City, the Batu City Government together with the Batu City Tourism Office are trying to develop villages in the Kota Batu area into tourist villages. This study aims to analyze collaborative governance in developing tourism village programs in Batu City. The method used is qualitative research with a descriptive analysis approach. The village is expected to be able to manage village assets ranging from natural resources and human resources which can be utilized by conducting community empowerment through programs that can improve the village economy and the community economy. Through community empowerment that is packaged in the Tourism Village program, it is hoped that the village will be able to take advantage of the existing potentials as a form of the village's independence process in managing its potential. In addition, the Tourism Village was formed as a driving force for the economy of the village community to be more advanced and prosperous without leaving the identity and culture in the village. Thus, he hopes that the existence of this Tourism Village can really boost the economic level of the Batu City community.

Keywords: Collaborative Governance; Tourism Village; Tourism; Cooperation;

Abstrak

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Batu berusaha mengembangkan desa di wilayah Kota Batu menjadi desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam pengembangan program desa wisata di Kota Batu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Desa diharapkan mampu mengelola aset-aset desa mulai dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang dapat meningkatkan ekonomi desa maupun perekonomian masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam program Desa Wisata diharapkan desa mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada sebagai bentuk proses kemandirian desa dalam mengelola potensi yang dimiliki. Selain itu Desa Wisata dibentuk sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat desa agar lebih maju dan sejahtera tanpa meninggalkan identitas dan budaya yang ada di desa. Dengan demikian, harapannya dengan adanya Desa Wisata ini benar-benar dapat mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat Kota Batu.

Keywords: Collaborative Governance, Desa, Desa Wisata, Pariwisata, Kerjasama

*)Penulis Korespondensi

E-mail : kamil@umm.ac.id

Pembahasan

Sebagai sebuah Kota yang memiliki sumber daya alam dan pemandangan nan indah, Kota Batu dapat memanfaatkan potensi yang ada sebagai wujud dari pengembangan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata. Letak kota yang strategis dan suhu udara yang sejuk dapat dimanfaatkan para pelancong untuk menikmati suguhan dari Kota kecil ini yang terkenal dengan sebutan De klain Switzerland atau Swiss Kecil Di Pulau Jawa yang dulu di sebut oleh penjajah Belanda saat beristirahat di Kota Batu. Dengan keaneka ragaman potensi yang dimiliki hedaknya mampu memberikan suatu trobosan untuk memanfaatkan apa yang dimiliki. Dikelilingi oleh pegunungan nan subur, Kota Batu merupakan salah satu Kota yang mata pencaharian masyarakatnya sebagai Petani dan penghasil pertanian yang cukup besar, dengan potensinya yang dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata.

Desa wisata adalah salah satu trobosan dari Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mewujudkan program Desa Berdaya Kota Berjaya yang merupakan tagline dari Visi-Misi Walikota Batu. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam program Desa Wisata diharapkan Desa mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada sebagai bentuk proses kemandirian Desa dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu Desa Wista dibentuk sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat desa agar lebih maju dan sejahtera tanpa meninggalkan identitas dan budaya yang ada di Desa. Di Kota Batu sendiri terdapat 19 Desa dan 5 Kelurahan yang tersebar di 3 Kecamatan. Setiap Desa memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan adat budaya, serta inovasi-inovasi yang muncul dari masyarakat Desa setempat.

Pada proses pengembangan desa wisata terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan utamanya dalam peran masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata yaitu 1. Proses persiapan 2. Tahap perencanaan 3. Tahap Operasional 4. Tahap Pengembangan 5. Tahap pengawasan dari keseluruhan tahap-tahap ini partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mengukur proses perkembangan program desa wisata di Desa Tulungrejo Kota Batu. Pada tahap perencanaan, masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya. (Kurniawati et al., 2018). Nantinya dari pola komunikasi antar sektor dapat dilihat dengan pendekatan menurut menurut (Ansell & Gash, 2007) mulai dari face to face dialogue, trust building, commitment to the process, share understanding, dan intermediate outcomes yang berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam pengembangan program desa wisata di Kota Batu. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya melihat bagaimana collaborative governance ini berjalan dalam proses pengembangan desa wisata di Kota Batu, serta bagaimana peran aktor dan kerjasama yang dilakukan sehingga membentuk sebuah kolaborasi yang tentunya dapat memperlancar pembangunan yang dilakukan, khususnya dalam pengembangan desa wisata di Kota Batu.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk dapat menjawab polemik secara aktual. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung kepada narasumber terkait yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu, dan para pelaku Desa Wisata. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan arsip-arsip terkait yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Jenis pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji serta mengklarifikasi terkait suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara alamiah. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait Collaborative Governance dalam pengembangan Desa Wisata di Kota Batu. Kemudian, analisis data dilakukan mencakup empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Mirzaqon, 2018). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, yang akan di uji keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber (Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. 2022).

Hasil dan Pembahasan

Face to Face (dialog tatap muka)

Menurut Ansell dan Gash, Collaborative Governance dibangun melalui dialog maupun komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan atau stakeholders. Dalam pelaksanaan rencana kerja pengembangan desa wisata, secara rutin melaksanakan pertemuan dengan stakeholder yang terdiri atas Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa setempat, Pengusaha Hotel dan Restoran yang berada di sekitar desa tersebut, serta Tokoh Masyarakat Desa. Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas persiapan, pemetaan potensi serta segala instrument yang diperlukan dalam pengembangan Desa Wisata.



Gambar 1 Kegiatan workshop dan Rapat Kerja Desa Wisata
Sumber : diolah dari hasil penelitian

Pada tahapan kolaborasi melalui dialog tatap muka ini tidak hanya membahas mengenai persiapan, pemetaan potensi serta segala instrument yang diperlukan dalam pengembangan Desa Wisata tetapi juga membahas mengenai regulasi dan kesepakatan bersama dalam menjalankan pengembangan desa wisata. Selain itu juga sebagai bentuk sarana untuk berbagi pemahaman antar Stakeholder yang terlibat.

Membangun Kepercayaan

Terbentuknya kepercayaan antar aktor-aktor didalam perencanaan pengembangan desa wisata di Kota Batu tidak terlepas dari terjalinnya komunikasi yang baik antara seluruh aktor-aktor yang terlibat. Proses awal terbentuknya rasa saling percaya tidak terlepas dari penyamaan visi-misi dalam hal untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Kota Batu. Adapun data mengenai wewenang setiap aktor dalam pengembangan desa wisata berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait sebagai berikut

Tabel 1 Data aktor & kewenangnya dalam pengembangan desa wisata di Kota Batu

Aktor	Wewenang
Dinas Pariwisata Kota Batu melalui Kabid Pengembangan destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam perencanaan, pemetaan serta pengembangan desa wisata • Sebagai evaluator dalam mengevaluasi program desa wisata • Menentukan kriteria pengembangan desa wisata • Menyiapkan regulasi mengenai pengembangan desa wisata berupa peraturan daerah • Ikut serta dalam menetapkan anggaran pengembangan desa wisata
DPRD Komisi B	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan potensi desa yang akan dikelola sebagai pariwisata
Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan musyawarah untuk menentukan arah pembangunan desa wisata • Membentuk organisasi desa wisata • Menjalinkan kerjasama dengan Pokdarwis, Bumdes, dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan desa wisata
Pihak swasta terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung dan memberikan

(apabila di desa terdapat hotel, restaurant, wisata buatan)

Kelompok sadar wisata (POKDARWIS)

Masyarakat desa

workshop mengenai pengelolaan pariwisata

- Memberikan pelatihan mengenai tata kelola pariwisata mulai dari akomodasi, manajemen sumber daya, promosi wisata dan daya tarik wisata
- Memberikan dukungan financial untuk pengembangan desa wisata sebagai bentuk CSR dari pemberdayaan masyarakat desa setempat
- Ikut serta dalam memetakan potensi desa yang akan di angkat sebagai desa wisata
- Memberikan pemahaman ilmu tentang kepariwisataan
 1. Prinsip 3A (atraksi, aksesibilitas dan amenitas)
 2. Sapta pesona
 3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan
- Mendukung dan menjaga keberlangsungan desa wisata
- Memberikan kenyamanan bagi para pengunjung dengan ramah
- Ikut serta dalam pengembangan desa wisata

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Komitmen terhadap Proses (*Comitment to Process*)

Adanya komitmen dari masing – masing stakeholders yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata mengacu pada Kontrak Kerjasama dan nota kesepakatan yang disepakati bersama antar aktor-aktor yang terlibat. Selain itu juga diharapkan bahwa pemerintah desa daerah setempat bisa membantu untuk membuat rencana kerja dan juga memiliki rencana yang jelas dalam melaksanakan pengembangan desa wisata. Berdasarkan hasil observasi penulis diakui bahwa kontribusi pemerintah sendiri sudah cukup baik dengan menjadi fasilitator dalam pengembangan desa wisata, perumusan aturan atau peraturan daerah tentang desa wisata, serta dari pihak swasta pemilik hotel dan pemilik wisata buatan seperti Jawa Timur Park Group memberikan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan pariwisata serta rebranding desa wisata. Dinas koperasi dan umkm memberikan pelatihan dan pengembangan UMKM yang ada di desa yang nantinya akan dijadikan sebagai buah tangan dan diujakan pada wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Adapun data klasifikasi pengembangan desa wiata di Kota Batu sebagai berikut

Tabel 2. Data Klasifikasi Pengembangan Desa Wisata di Kota Batu 2020.

Klasifikasi	Nama Desa
Potensi (Desa memiliki potensi namun masih belum bisa dimaksimalkan dikarenakan kendala sumber daya manusia, keadaan keuangan desa, dan memiliki keunikan yang dapat di kembangkan sebagai desa wisata seperti hasil pertaniannya, UMKM, Kesenia, budaya desa, dan lain sebagainya)	1. Dadaprejo 2. Pendem 3. Mojorejo 4. Ngaglik 5. Tlekung 6. Songgokerto 7. Pesanggrahan
Berkembang (Desa sudah melakukan pemetaan mengenai potensi desa, terbentuk organisasi desa wisata, memiliki keunikan untuk diangkat sebagai atraksi desa wisata seperti pengelolaan hasil pangan, pengelolaan sampah, adanya tempat singgah, terdapat festival-festival yang dapat di suguhkan kepada wisatawan yang hadir seperti festival brantas di Sisir, Festival Kemul Sarung di Gunungsari, Festival Kaki Langit di Desa Sumber Brantas	1. Sumbergondo 2. Oro-oro ombo 3. Sisir 4. Bulukerto 5. Sumber brantas 6. Tulungrejo 7. Gunungsari 8. Junrejo

serta keunikan seperti adanya cafe cafe yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung)

Maju (Desa sudah dapat memanajemen sumber daya manusia dan potensi yang ada, tersedia paket desa wisata mulai dari tujuan wisata sampai pada biaya dan akomodasinya, desa wisata telah menerapkan prinsip 3A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi), adanya home stay untuk wisatawan, adanya tour guide dan sovenir yang sudah include dengan biaya akomodasi. Menjalankan kerjasama dengan investor yang dapat membantu dalam pengembangan desa wisata dan dapat memanfaatkan dana desa serta pengembangan desa wisata memberikan dampak terhadap pendapatan desa)

Mandiri (Desa sudah dapat mengelola desa wisatanya, sudah tidak bergantung pada pihak swasta dan dinas pariwisata dalam proses pengembangan dan pembangunan pariwisata, menjalankan Prinsip 3A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi), adanya home stay untuk wisatawan, adanya tour guide dan sovenir yang sudah include dengan biaya akomodasi. Terdapat festival kesenian dan kegiatan kebudayaan yang dapat di suguhkan kepada wisatawan. Terdapat cafe dan tempat singgah untuk wisatawan beristirahat sembari menikmati keindahan alam dan makanan khas desa)

9. Giripurno
10. Sidomulyo
11. Torongrejo
1. Bumiaji
2. Punten
3. Beji
4. Pandanrejo
5. Sumberjo
6. Temas

Belum ada

Sumber : hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Batu

Pada tahapan monitoring evaluasi desa wisata terdapat tim evaluasi yang terdiri dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Pihak Swasta yang bergerak dalam pengembangan wisata, serta masyarakat sebagai partisipan dalam pengembangan desa wisata yang dapat menilai secara langsung keberadaan desa wisata yang telah dikembangkan, selain itu pertanggung jawaban evaluasi akan di sampaikan kepada kepala daerah atau walikota dalam acara jambore Desa Wisata Kota Batu dengan memamerkan destinasi yang berada pada desa-desa wisata di Kota Batu. Hal yang menjadi kendala adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengembangan desa wisata dan promosi desa wisata yang terbilang masih kurang masif digaungkan karena kalah dengan wisata-wisata buatan.

Sikap Saling Memahami (*Share Understanding*)

Pada pelaksanaan Collaborative Governance dalam pelaksanaan pengembangan Desa Wisata di Kota Batu ini didasarkan pada kesamaan tujuan atau visi misi bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan destinasi wisata desa dan mengangkat perekonomian desa yang dapat menyumbangkan pendapatan desa serta pemasukan bagi masyarakat desa setempat. Pihak Dinas Pariwisata kota batu menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan atas dasar semangat untuk mengembangkan pariwisata dan mendorong kemandirian desa untuk mengelola potensi desa yang ada. Selain itu pemerintah membuat kebijakan untuk menentukan arah pembangunan desa wisata agar dalam pengembangannya para aktor mengetahui fungsi dan tugasnya untuk ikut serta dalam perencanaan, pengembangan hingga pada tahap monitoring dan evaluasi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas pariwisata Kota Batu melalui Kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata mengatakan bahwa saat ini peraturan daerah mengenai Desa wisata sedang di bahas oleh DPRD Kota Batu sebagai bentuk pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan. Selain itu dalam perda ini diatur bagaimana sistem kerja dan aktor-aktor yang dapat terlibat di dalam pengembangan desa wisata, selain itu juga apabila terdapat kendala-kendala dalam pengembangan desa wisata maka dapat diadakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian masalahnya.

Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa sebagian wisatawan yang berkunjung masih belum mengetahui keberadaan desa wisata yang ada di Kota batu ini. Pengelola desa wisata masih perlu melakukan evaluasi dan monitoring mengenai pengembangan desa wisata yang ada di desa setempat serta melakukan rebranding melalui media sosial dan ajang promosi yang dapat disalurkan oleh dinas pariwisata kota batu dalam berbagai kesempatan dan pameran wisata. Adanya kerjasama secara berkelanjutan dalam pengembangan desa wisata juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan desa wisata yang ada di desa setempat untuk dikelola dengan memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada dan pengembangan Prinsip 3A Aksesibilitas, Amneitas, dan atraksi dalam pengembangan desa wisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa wisata setempat sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat desa dan stakeholder yang terkait maupun pihak-pihak swasta yang terlibat. Melalui pengembangan desa wisata ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat serta meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seperti pada desa wisata yang terklasifikasi kedalam kategori maju sebagai berikut

Tabel 3. Data destinasi desa wisata katagori Maju di Kota Batu tahun 2019-2020

Desa wisata	Keunikan destinasi	Produk unggulan
Desa wisata Punten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung wisata Kungkuk (out bound and camping ground) 2. Wisata petik jeruk 3. Edukasi perah Susu Sapi 4. Gang Ramah Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeruk keprok punten 2. Cafe 3. Susu sapi murni 4. Cafe KWK 5. Terdapat homestay
Desa wisata Bumiaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petilasan makam mbah mbatu 2. Peternakan kambing etawa 3. Edukasi batik banteng khas Kota Batu 4. Wisata petik jambu Kristal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susu kambing etawa 2. Batik banteng 3. Jambu kristal 4. Cafe retorika dan moustera 5. Terdapat homestay
Desa Wisata Beji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival Kampung tempe 2. Kampung Sapi 3. Kampung wayang 4. Kampung hijau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempe 2. Susu sapi murni 3. Pengelolaan sampah 4. Pembuatan wayang
Desa Wisata Pandanrejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lumbung strawberry 2. Tubing 3. Edukasi pertanian strawberry 4. Festival wani panen strawberry 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil olahan strawberry 2. Cafe lumbung strawberry 3. Terdapat homestay
Desa Wisata Sumberjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Petik sayur 2. Wisata petik Kopi 3. Edukasi penanaman sayur mayur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas sayur mayur seperti Seledri, kembang kol, brokoli, selad dan lain sebagainya

Desa Wisata Temas	1. Edukasi pertanian sayur	2. Terdapat homestay atau villa
	2. Festival kampung tani	1. Petik sayur organik
	3. Edukasi pembuatan tahu dan tempe	2. Olahahan tempe dan tahu
	4. Kampung ekologi temas	3. Terdapat homestay dan villa bagi pengunjung

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu

Dari data desa wisata yang maju maka pemerintahan Kota Batu melalui Dinas Pariwisata menginginkan peningkatan desa wisata tersebut menjadi desa wisata mandiri dengan tetap berkordinasi dengan dinas dan aktro-aktor yang sudah mendukung desa wisata tersebut untuk menjadi mandiri. Sedangkan desa wisata berkembang dapat ditingkatkan menjadi desa wisata maju dengan memperhatikan pada aspek-aspek indikator yang telah di buat oleh dinas pariwisata utamanya pelyanan penunjang wistawan.

Kesimpulan

Proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam pengembangan Desa Wisata melalui Collaborative Governance dapat dijelaskan melalui komponen (1) *Face to face dialogue*, (2) *Trust Building*, (3) *Commitment to Process*, (4) *Sharing Understanding*, dan (5) *Intermediate Outcome*. Dimana Collaborative Governance dibangun melalui dialog maupun komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan atau stakeholders, dengan membentuk sikap saling percaya serta saling memahami satu sama lain, dengan tetap mempertahankan komitmen dan tujuan utama dalam pengembangan Desa Wisata di Kota Batu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dapat dikatakan bahwa pengembangan desa wisata di Kota Batu hampir semua desa sudah memiliki potensi yang dapat dikemas dalam program Desa Wisata, namun masih perlu adanya pendampingan hingga menuju tingkatan mandiri agar dapat lebih bermanfaat bagi pemerintah desa maupun bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat. Melalui pengembangan desa wisata ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat serta meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemeirntahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungannya dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Andhita, C., Kirana, D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu Tourism Village Development Based on Collaborative Governance in Batu City. 6(April), 68-84.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborattive Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 1-13.
- Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. (2022). The Role of The Village Administration in The Management of Tourist Village in Pacitan Regency. MAJAPAHIT POLICY, 2(2).

- Kurniawati, E., Hamid, D., & Hakim, L. (2018). Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 54(1), 8-14.
- Windia, W., Wirartha, M., Suamba, K., & Sarjana, M. (2007). Model Pengembangan Agrowisata Di Bali. *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 7(1).
- Kirana, C. A. D. (2017). Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Batu (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu). Universitas Brawijaya
- Winasis, A., & Setyawan, D. 2016. Efektivitas Program pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2